

2023

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Surabaya

LKj (Laporan Kinerja)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja (LKj) pada hakekatnya merupakan bentuk komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya akan terus berupaya memperbaiki kekurangan dan bekerja dengan lebih baik lagi serta mengembangkan inovasi sehingga di masa mendatang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sehingga mampu mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mendukung terwujudnya good government di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Surabaya, 5 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Surabaya



Muhammad Fikser AP., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 197405091994121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 memiliki lima (5) sasaran strategis dengan total lima (5) indikator kinerja, dan lima (5) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap lima (5) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89.56	96.80	108.08%
2.	Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	48 %	59.36	123.67%
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100 %	56.25	112.50%
4.	Meningkatnya nilai target indikator SPBE	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	50 %	100.00	100.00%
5.	Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100 %	100.00	100.00%

Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 87.629.452.236,- atau 87,47% dari total pagu anggaran sebesar Rp 100.177.080.879,-.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
BAB IV PENUTUP.....	33
LAMPIRAN	34

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) perangkat daerah merupakan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab tersebut akan menuangkan hasil pelaksanaan kebijakan dan program tahun anggaran 2023 dalam LKj yang mencerminkan tugas pokok dan fungsinya.

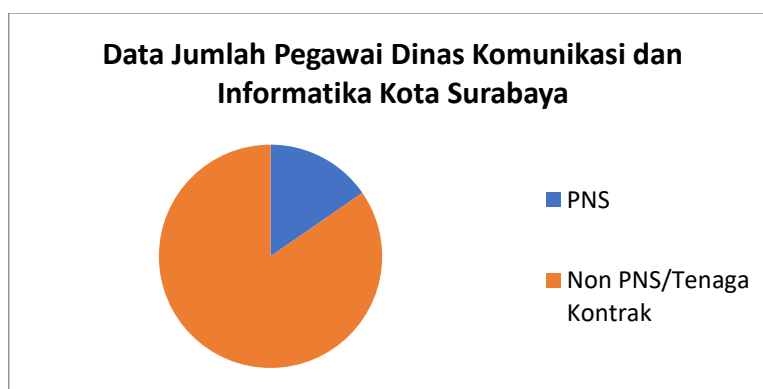
Penyusunan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2023 adalah sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategi (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2023. Sedangkan tujuannya adalah sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa yang akan datang.

I.2. Gambaran Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jimerto No. 25 – 27 lantai V Kantor Pemerintah Kota Surabaya, telephone Telp. (031) 5312144 Pesawat 384; 527; 232; 164; 275 , Faksimile. (031) 5450154. Laman surabaya.go.id , Pos-el : dinkominfo@surabaya.go.id

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2023 didukung oleh 208 orang, terdiri dari 32 orang PNS dan 176 orang non PNS/tenaga kontrak. Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya PNS dan kontrak sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik I.1
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2023



➤ Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi:

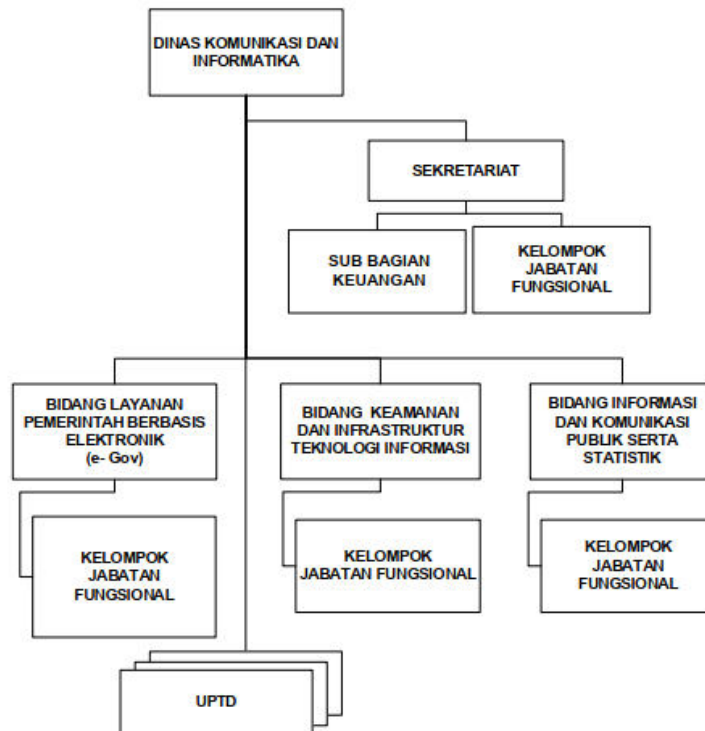
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya. Untuk itu berikut kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya :

- Kedudukan :
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.
- Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Struktur Organisasi :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :
 1. Sekretariat
 2. Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi
 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik
 4. Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov)

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar I.1 berikut ini:

Gambar I.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



I.3. Isu-Isu Strategis

I.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, serta penunjang Urusan dimana ketiga Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tersebut diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta statistik; Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keamanan dan infrastruktur teknologi; Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), yang bertanggung jawab dalam mengelola aplikasi, memberikan layanan teknologi informasi, serta menjalankan tata kelola dan evaluasi layanan pemerintah berbasis e-Gov. Sedangkan penunjang urusan diampu oleh Sekretariat.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Urusan maupun Bidang yang diampu adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

- Belum optimalnya implementasi literasi digital
- Belum optimalnya manajemen isu pemerintah
- Tidak semua Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- Adanya permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan segera

2. Penyelenggaraan statistik sektoral

- Belum terwujudnya satu data yang terintegrasi
- Belum adanya Bidang yang mengampu Urusan statistik
- Data masih tersebar di masing-masing lembaga produsen data
- Belum adanya satu sistem yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat digunakan oleh lembaga produsen data untuk mengentrikan/mengupdate data

3. Pengelolaan aplikasi informatika

- Belum diterapkannya tanda tangan digital yang tersertifikasi
- Belum adanya sistem penghubung layanan
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pusat data
- Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi standard nasional
- Belum tersedianya beberapa dokumen penunjang terkait aspek-aspek SPBE

4. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

- Belum optimalnya penerapan manajemen keamanan informasi

I.3.2. Tantangan dan Peluang

Semenjak ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, banyak tantangan dan peluang baru yang muncul bagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Salah satu tantangan terbesar adalah menjalankan indikator kinerja dan evaluasi dari pelaksanaan SPBE. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, terdapat banyak indikator yang harus dipenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- ❖ Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika:
 1. Pengelolaan Layanan Pusat Data;
 2. Pengelolaan layanan jaringan intra Instansi;
 3. Pengelolaan sistem penghubung layanan;
 4. Manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
 5. Jaminan keamanan sistem TIK;
 6. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat;
 7. Pemetaan aspek dan indikator dalam arsitektur SPBE yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Pelaksanaan dan pemenuhan aspek dan indikator SPBE yang diwujudkan dalam program dan kegiatan.
- ❖ Peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika:
 1. Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK;
 2. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika);
 3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK;

4. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM;
5. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat;
6. Penyelenggaraan statistik sektoral;
7. Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations);
8. Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah;
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

I.3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisa faktor pendorong dan penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika, ditentukan isu-isu strategis melalui scoring terhadap kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil scoring didapatkan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi satu data

Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan. Namun sayangnya data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah. Data yang tersimpan di masing-masing Perangkat Daerah ini sering menyebabkan terjadi duplikasi data. Bahkan data tertentu dimiliki atau dikelola oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah sehingga menyulitkan untuk mengetahui data mana yg lebih tepat dan akurat.

Seyogyanya semua Perangkat Daerah harus sepakat terkait dengan format dan metadata suatu data. Karena dengan beragamnya format dan meta data di masing-masing perangkat daerah akan menyulitkan untuk mengintegrasikan menjadi satu data. Sehingga penting sekali keberadaan regulasi yang mengatur terkait dengan implementasi satu data.

2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pusat data

Pusat data merupakan fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mengelola dan

menyelenggarakan layanan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk layanan. Pusat data juga memiliki infrastruktur, konektivitas, pengelolaan, manajemen dan alokasi sumber daya untuk keperluan ketersediaan layanan jangka panjang, kehandalan dan keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi.

Pusat data yang menjadi sentral layanan teknologi informasi dan komunikasi menjadi aset vital bagi terselenggaranya layanan, baik berjalannya sebuah layanan sistem informasi, dan akses dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pusat data menjadi strategis karena menunjukkan eksistensi aset yang sangat berharga yaitu data dan informasi. Dalam perspektif nasional, sebuah negara, instansi pemerintah, organisasi bisnis pasti berusaha untuk menjaga kepentingan, dan aset pentingnya tersebut sehingga keberadaan pusat data menjadi penting.

3. Belum optimalnya penerapan manajemen keamanan informasi

Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Penyelenggara pelayanan publik terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman Keamanan Informasi, yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Peran sumber daya informasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability). Adanya ancaman terhadap sumber daya informasi tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengamanan data dan informasi.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 2. 1
Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target 2023
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,2
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89.56
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.55 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit
Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik		Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	48 %
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	86 %
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis
		Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPIID ≤ 17 hari kerja	100 %
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target 2023
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen Publik
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen Kepentingan
			Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100 %
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100 %
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen
			Meningkatnya nilai target indikator SPBE	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	50 %
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100 %
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO $\leq 1 \times 24$ jam b. Jaringan FO $\leq 3 \times 24$ jam	100 %
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	226 Unit
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi $\leq 1 \times 24$ jam	100 %
				Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100 %
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen
			Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100 %
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	18 %
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target 2023
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan keputusan walikota mengenai indikator kinerja utama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Berikut tabel indikator kerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2023:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya nilai target indikator SPBE	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE.	%	Jumlah indikator yang ditingkatkan dan/atau dipertahankan level kematangannya pada tahun berjalan/ total seluruh indikator (kebijakan, tata kelola dan manajemen) yang menjadi kewenangan.	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani.	%	((Jumlah penanganan serangan): (Jumlah serangan)) x 100%.	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik.	%	((Masyarakat yang terjangkau informasi publik) : (jumlah penduduk Kota Surabaya)) x 100%.	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi.	%	(jumlah data terpublikasi : jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi) x 100%.	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika.	%	Nilai SAKIP OPD hasil evaluasi/penilaian Inspektorat.	Dinas Komunikasi dan Informatika

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada Bulan November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategis yang mmempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran), dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan
1.	Meningkatnya nilai target indikator SPBE.	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE.	50%	50%	65.996.498.087	63.232.092.861
2.	Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota.	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani.	100%	100%	5.935.057.443	5.556.244.869
3.	Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik.	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik.	48%	48%	14.851.864.403	14.217.068.422
4.	Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota.	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi.	100%	100%	575.785.933	556.836.032
5.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika.	89,56	89,56	16.142.919.352	16.614.838.695

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkanlah anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	556.836.032
• Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	556.836.032
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.614.838.695
• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.387.430.200
• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.536.593.627
• Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.814.868
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	5.556.244.869
• Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.681.829.159
• Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1.874.415.710
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	14.217.068.422
• Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.217.068.422
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	63.232.092.861
• Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.960.422.659
• Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.271.670.202
Jumlah	100.177.080.879

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja 2023

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun n	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89.56	0	96.80	96.80	96.80	96.80	108.08%
2.	Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	48 %	16,82	34,91	46,5	59,36	59.36	123.67%
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100 %	100	100	100	100	100.00	100.00%
4.	Meningkatnya nilai target indikator SPBE	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	50 %	0	0	0	56,25	56.25	112.50%
5.	Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100 %	100	100	100	100	100.00	100.00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

III.2. Analisis Capaian Kinerja

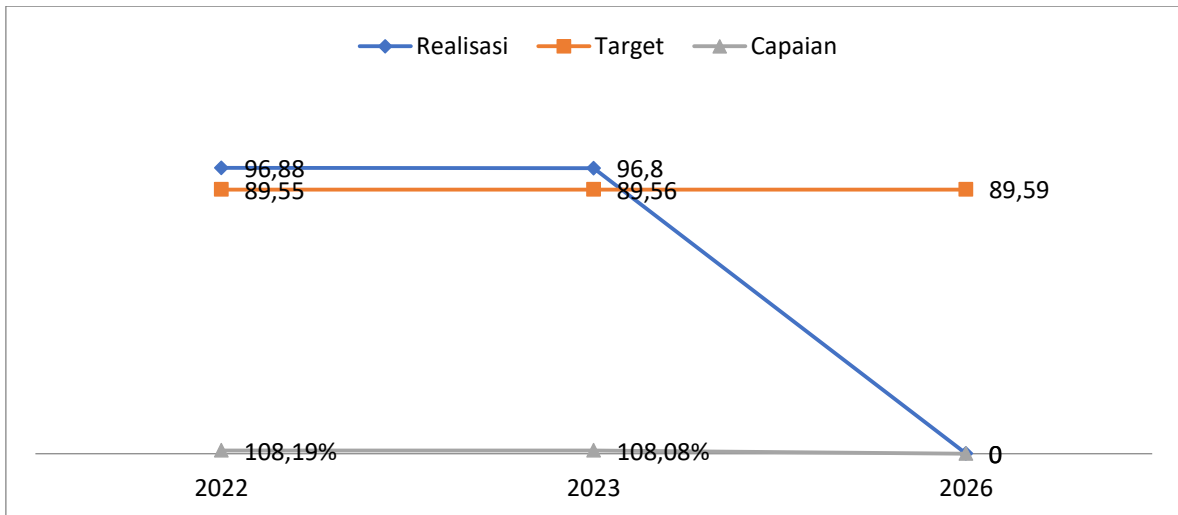
III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89.56	96.80	108.08%

- Sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 indikator yaitu nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target nilai 89,56, pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai 96,80 dengan capaian 108,08%. Berikut grafik pencapaian kinerja pada indikator nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun ini dengan tahun lalu, serta tahun berikutnya sesuai dengan dokumen renstra :



- Adapun Penyebab keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Tersedianya data yang valid dan dukungan aplikasi egovernment yang baik sehingga penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan menjadi lebih mudah.
2. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam tim dan dengan Perangkat Daerah terkait penilaian SAKIP
3. Komitmen Dinkominfo dalam penyelenggaraan SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjang dengan 1 program:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan :

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - o Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - o Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

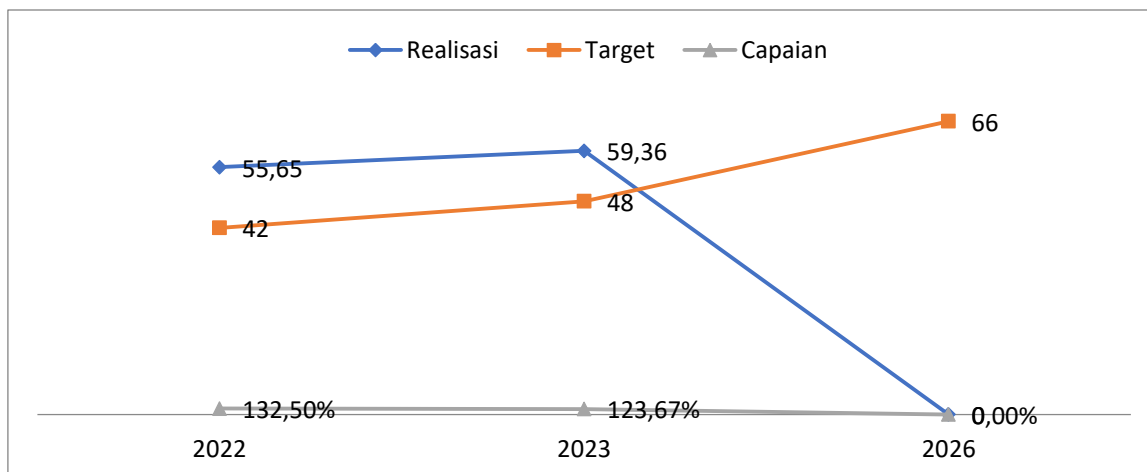
III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	48 %	59.36	123.67%

- Sasaran strategis meningkatkan pengelolaan komunikasi publik memiliki 1 indikator yaitu persentase cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik dengan target 48%, pada tahun 2023 sasaran strategis ini telah terealisasi 59,36 dengan capaian 123,67%. Berikut grafik pencapaian kinerja pada indikator persentase cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik tahun ini dengan tahun lalu, serta tahun berikutnya sesuai dengan dokumen renstra :



- Adapun Penyebab keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :
 1. Komitmen Dinkominfo untuk melakukan penyusunan agenda setting secara rutin untuk merencanakan konten media sosial dan website.
 2. Konten media sosial dan website yang selalu update dengan redaksi yang menarik dan berkelanjutan untuk menarik minat masyarakat.

3. Memperluas jangkauan informasi publik melalui personalisasi konten media sosial sehingga akun media sosial Pemerintah Kota Surabaya direkomendasikan kepada pengguna lainnya.
 4. Menyelenggarakan lomba-lomba media sosial bagi masyarakat terkait program-program Pemerintah Kota Surabaya sehingga semakin banyak masyarakat yang mengakses dan terjangkau informasi
- Dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan pengelolaan komunikasi publik ditunjang dengan 1 program:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - o Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - o Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - o Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

III.2.3. Sasaran Strategis 3 : Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota

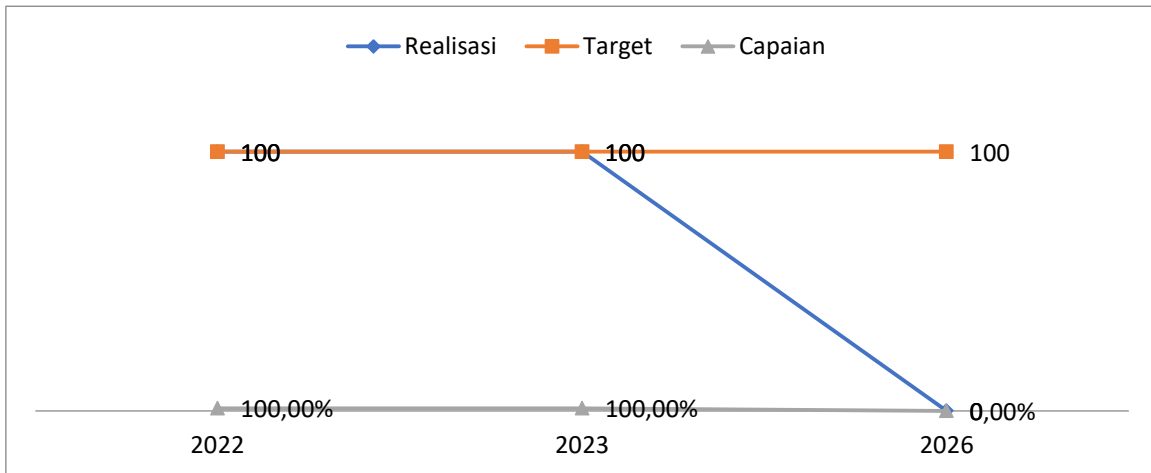
Capaian indikator-indikator sasaran “Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Sasaran “Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi.	100%	100	100%

- Sasaran strategis mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota memiliki 1 indikator yaitu persentase hasil analisa data yang terpublikasi dengan target 100%, pada tahun 2023 sasaran strategis ini telah terealisasi 100 dengan capaian 100%. Berikut grafik pencapaian kinerja pada indikator persentase cakupan masyarakat yang terjangkau

informasi publik tahun ini dengan tahun lalu, serta tahun berikutnya sesuai dengan dokumen renstra :



- Adapun Penyebab keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :
 1. Koordinasi yang intensif dan baik dengan Perangkat Daerah penyedia data sehingga data - data yang dibutuhkan dapat tersedia dan dilakukan pengolahan data tepat pada waktunya.
 2. Verifikasi validasi data yang disampaikan Perangkat Daerah.
 3. Komitmen Dinkominfo untuk mempublikasi data tepat waktu.
 4. Dukungan sistem informasi Portal satu data untuk publikasi data.

- Dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan pengelolaan komunikasi publik ditunjang dengan 1 program:
Program penyelenggaraan statistik sektoral memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - o Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

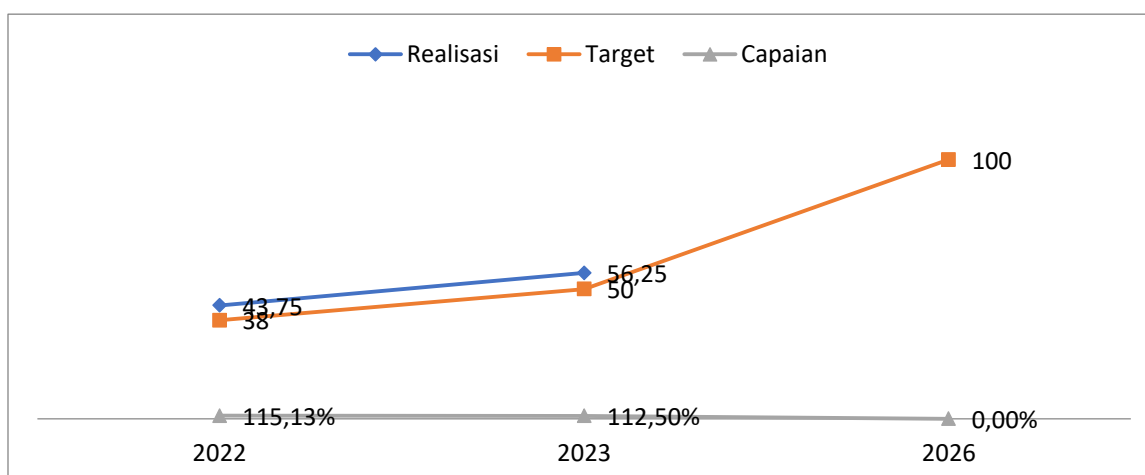
III.2.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya nilai target indikator SPBE

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya nilai target indikator SPBE” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya nilai target indikator SPBE” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	50%	56.25	112.50%

- Sasaran strategis meningkatnya nilai target indikator SPBE memiliki 1 indikator yaitu persentase peningkatan nilai target indikator SPBE dengan target 50%, pada tahun 2023 sasaran strategis ini telah terealisasi 56.25 dengan capaian 112.50%. Berikut grafik pencapaian kinerja pada indikator persentase peningkatan nilai target indikator SPBE tahun ini dengan tahun lalu, serta tahun berikutnya sesuai dengan dokumen renstra :



- Adapun Penyebab keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :
 1. Komitmen Dinkominfo untuk peningkatan indeks SPBE antara lain melalui :
 - Penetapan Perangkat Daerah PIC (Koordinator) untuk setiap aspek/indikator SPBE
 - Evaluasi mandiri atas penilaian tahun 2022 untuk ditindaklanjuti di tahun 2023
 - Pendampingan dan verifikasi perangkat daerah untuk mencapai tingkat kematangan yang optimal pada masing-masing indikator SPBE
 - Kolaborasi dengan tim

SPBE untuk mengoptimalkan dan meningkatkan nilai indeks SPBE di tahun 2023 - Pemenuhan data dukung masing-masing indikator SPBE untuk mencapai kenaikan tingkat kematangan

2. Adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan nilai indikator SPBE

- Dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan pengelolaan komunikasi publik ditunjang dengan 1 program:

Program pengelolaan aplikasi informatika memiliki 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan :

1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

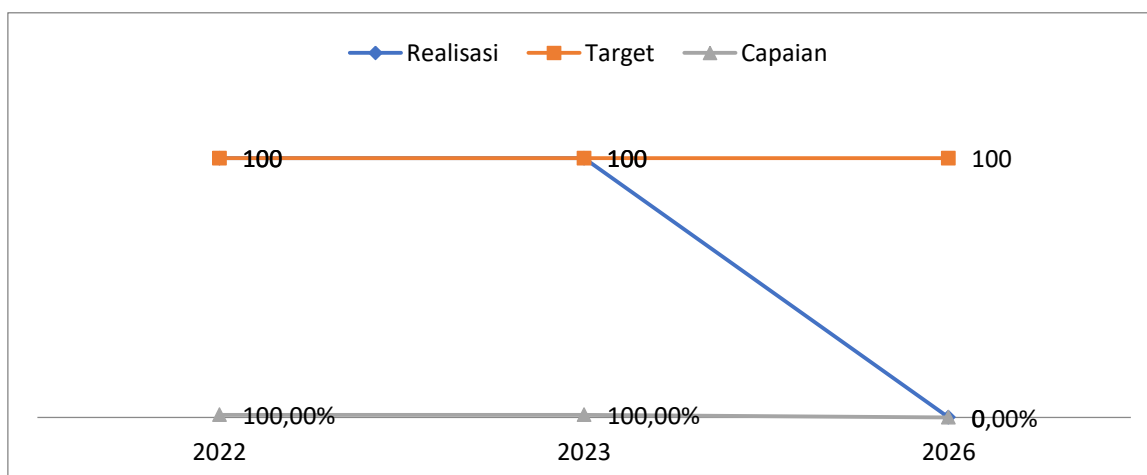
III.2.5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100%	100	100%

- Sasaran strategis meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota memiliki 1 indikator yaitu persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani dengan target 100%, pada tahun 2023 sasaran strategis ini telah terealisasi 100 dengan capaian 100%. Berikut grafik pencapaian kinerja pada indikator persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani tahun ini dengan tahun lalu, serta tahun berikutnya sesuai dengan dokumen renstra :



- Adapun Penyebab keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :
 1. Komitmen Dinkominfo dalam penguatan keamanan informasi dan monitoring serangan terhadap keamanan informasi

2. Tersedianya sistem keamanan informasi yang tangguh sehingga dapat menanggulangi serangan
 3. Adanya tim teknis pengelolaan server Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki kompetensi keamanan siber.
 4. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sistem keamanan informasi
 4. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sistem keamanan informasi
 5. Adanya prosedur/mechanisme teknis sebagai panduan dalam penanganan serangan
 6. Penerapan uji keamanan bagi sistem aplikasi yang baru dibangun sebelum dilakukan instalasi dan publikasi ke internet
- Dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota ditunjang dengan 1 program:
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi memiliki 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - o Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

III.3. Capaian Kinerja Lain

III.3.1. Penghargaan yang di Raih Dinas Komunikasi dan Informatika

- **Jatim Public Relation Award (JPRA) tahun 2023**

Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak rangkaian acara JPRA 2023 yang digelar di Kota Surabaya, Senin (30/10/2023). Penghargaan yang berhasil diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yaitu antara lain :

1. Terbaik 1 JPRA 2023 Kategori Pers Rilis,
2. Terbaik 1 JPRA 2023 Kategori Media Sosial,
3. Terbaik 2 JPRA 2023 Kategori Website, dan
4. Terbaik 2 JPRA 2023 Program Komunikasi Publik.

III.4. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 adalah sebesar Rp 100.177.080.879,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 87.629.452.236,-, atau sebesar 87,47%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	556.836.032	530.790.820	95,32%
• Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	556.836.032	530.790.820	95,32%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.614.838.695	15.336.125.897	92,30%
• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.387.430.200	13.314.337.712	92,54%
• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.536.593.627	1.418.729.230	92,33%
• Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.814.868	603.058.955	87,30%
Program Penyelenggaraan	5.556.244.869	5.312.642.653	95,62%

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
• Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.681.829.159	3.537.959.413	96,09%
• Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1.874.415.710	1.774.683.240	94,68%
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	14.217.068.422	11.827.411.038	83,19%
• Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.217.068.422	11.827.411.038	83,19%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	63.232.092.861	54.622.481.828	86,38%
• Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.960.422.659	49.225.765.521	89,57%
• Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.271.670.202	5.396.716.307	65,24%
Jumlah	100.177.080.879	87.629.452.236	87,47%

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89.56	96.80	108.08%	16.614.838.695	15.336.125.897	92,30%
2	Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	48 %	59.36	123.67%	14.217.068.422	11.827.411.038	83,19%
3	Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100 %	100.00	100.00%	556.836.032	530.790.820	95,32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya nilai target indikator SPBE	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	50 %	56.25	112.50%	63.232.092.861	54.622.481.828	86,38%
5	Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100 %	100.00	100.00%	5.556.244.869	5.312.642.653	95,62%

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negar, dunia usaha dan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya serta dapat memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan di masa mendatang.

Surabaya, 5 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Surabaya



Muhammad Fikser AP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001

LAMPIRAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Surabaya, 26 Februari 2024
Inspektur,

RACHMAD BASARI, S.E, M.M
NIP 196903231996021001

Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD FIKSER, AP, MM

Jabatan : PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERI CAHYADI

Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Surabaya, 10 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERI CAHYADI

MUHAMAD FIKSER, AP, MM
NIP 197405091994121001

**PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai target indikator SPBE.	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE.	50%
2	Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota.	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani.	100%
3	Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik.	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik .	48%
4	Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota.	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi.	100%
5	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika.	89,56

No Program	Anggaran
1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.	Rp 63.232.092.861
2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	Rp 5.556.244.869
3 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.	Rp 14.217.068.422
4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.	Rp 556.836.032
5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.	Rp 16.614.838.695
TOTAL	Rp 100.177.080.879

Surabaya, 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA

PIL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



ERI CAHYADI



MUHAMAD FIKSER, AP, MM
NIP 197405091994121001

DOKUMENTASI PENGARGAAN

